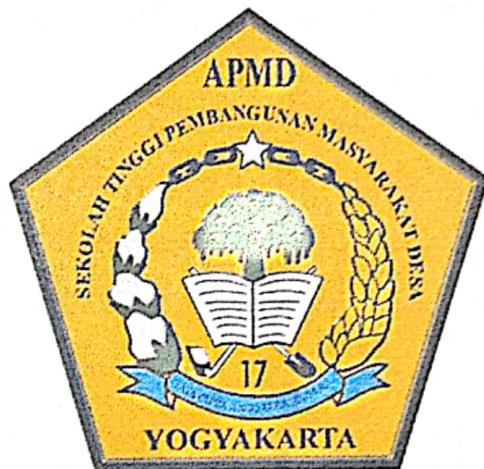


SKRIPSI

GOVERNABILITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KALURAHAN WONOKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN SELMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Disusun Oleh :

RISKA ANGELINA

NIM : 18520018

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022



**GOVERNABILITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI
KALURAHAN WONOKERTO, KAPANEWON TURI, KABUPATEN
SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta**



Disusun Oleh :

RISKA ANGELINA

NIM : 18520018

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 April 2022

Waktu : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Utami Sulistiana, S.P., M.P

Ketua Penguji/Pembimbing

2. Ir. Nelly Tiurmida, MPA

Penguji Samping I

3. Dra. Sri Utami, M.Si

Penguji Samping II



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Anggelina
NIM : 18520018
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul “Governabilitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta” merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bersedia menerima sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 14 April 2022

Yang Membuat Pernyataan



Riska Anggelina

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Governabilitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta” ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis;
3. Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, MPA dan Ibu Dra. Sri Utami, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, koreksi dan kritik untuk memperbaiki skripsi penulis;
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;

6. Segenap pihak pemerintah kalurahan dan seluruh masyarakat Kalurahan Wonokerto, penulis ucapan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya sehingga penulis dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Orangtua, saudara, dan keluarga yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis;
8. Seluruh teman-teman seperjuangan dari program studi Ilmu Pemerintahan khususnya kepada angkatan 2018 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun agar skripsi ini dapat lebih baik. Akhir kata penulis ucapan terima kasih dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 14 April 2022

Penulis

Riska Anggelina

MOTTO

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya”

(1 Korintus 10:13)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas setiap berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, karena tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain, penyusunan skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan yang selalu senantiasa memberikan kesehatan, berkat, serta penyertaan dan perlindunganNya kepada saya selama menempuh pendidikan.
2. Kedua orangtua saya Bapak Ilham Dani dan Ibu Mariam, terima kasih atas segala perjuangan, kerja keras, doa, dukungan baik dalam bentuk moril maupun materiil dan motivasi serta segala yang kalian berikan sehingga saya bisa sampai pada titik ini.
3. Untuk saudara/i saya Siska Carolina, Rika Anggeriny, Jenni Arianti, Christian, terima kasih atas semua dukungan yang diberikan kepada saya selama menempuh pendidikan.
4. Untuk Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P yang telah membimbing, memberikan masukan ataupun saran serta mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman seperjuangan saya terutama Vinore Bitu Meja yang selalu bersedia membantu dan menemani saya ke lokasi penelitian, Felinda Kusumawati, Lerry Chandra, Putri Dian Laurensa Simorangkir, dan Angga yang selalu memberikan masukan, dukungan maupun motivasi semoga Tuhan selalu menyertai dan membalas kebaikan kalian semua.

ABSTRACT

GOVERNABILITY OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE DEVELOPMENT OF MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE VILLAGE OF WONOKERTO

By: Riska Anggelina

The village government as an element of village administration has an important role in managing its territory, one of which is paying attention to and serving the interests of the village community. This will of course be related to governability or the capacity of the village government in carrying out its duties and functions, including in providing support for MSME activities in the Wonokerto Village through the implementation of development programs for MSME actors. MSME development is carried out in order to empower or bring about a change to the level of business for the better through increasing business, production quality, and increasing human resource capabilities. For this reason, the governance of the Wonokerto Village government is a benchmark for the success of MSMEs to continue to survive and develop in encouraging the improvement of people's welfare. As for the formulation of the problem in this study, namely why is the capacity of the village government in developing MSMEs in Wonokerto Village not yet maximized?

This research was conducted using qualitative explanatory research. The object of this research is related to the capacity of the Wonokerto Village government. Meanwhile, the subjects studied in this study were the Wonokerto Village Government, MSME Management and MSME Actors. In this study, the number of informants consisted of 6. The technique of determining the informants in this study used a purposive sampling technique. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The data analysis technique is using data triangulation, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of the study concluded that the governability of the village government in encouraging the development of MSMEs has not been fully maximized. This is because, the training provided is less varied according to the needs of MSMEs, the tools used to support the production process are still limited, there is no effort from the village government to help overcome limited capital, as well as MSME actors who do not develop their potential. Meanwhile, the district government's obstacle in encouraging the development of MSMEs is due to weak marketing, the number of products produced is not balanced with the ability to expand market access, so that weak market access has an impact on narrow market opportunities for MSMEs.

Keywords : Governability, Village Government, Development, MSME

INTISARI

GOVERNABILITAS PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KALURAHAN WONOKERTO

Oleh: Riska Anggelina

Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa mempunyai peranan yang penting dalam mengurus wilayahnya, salah satunya yaitu dalam memperhatikan dan melayani kepentingan masyarakat desa. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan governabilitas atau kapasitas dari pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk dalam memberikan dukungan terhadap kegiatan UMKM yang ada di Kalurahan Wonokerto melalui penyelenggaraan program pengembangan untuk pelaku UMKM. Pengembangan UMKM dilakukan dalam rangka untuk memberdayakan atau membawa suatu perubahan terhadap level usaha ke arah yang lebih baik melalui peningkatan perluasan usaha, kualitas produksi, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Untuk itu, governabilitas pemerintah Kalurahan Wonokerto menjadi tolak ukur keberhasilan UMKM untuk terus tetap bertahan dan berkembang dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa kapasitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Wonokerto belum maksimal?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif eksplanatif. Obyek dalam penelitian ini adalah terkait kapasitas pemerintah Kalurahan Wonokerto. Sedangkan, subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Wonokerto, Pengurus UMKM dan Pelaku UMKM. Pada penelitian ini jumlah informan yaitu terdiri dari 6 orang. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa governabilitas pemerintah kalurahan dalam mendorong pengembangan UMKM belum sepenuhnya dapat dikatakan maksimal. Hal ini dikarenakan, pelatihan yang disediakan kurang variatif sesuai dengan kebutuhan UMKM, alat yang digunakan untuk menunjang proses produksi masih terbatas, belum adanya upaya dari pemerintah kalurahan untuk membantu mengatasi keterbatasan modal, serta pelaku UMKM yang kurang mengembangkan potensi diri. Sementara itu, hambatan pemerintah kalurahan dalam mendorong pengembangan UMKM yaitu dikarenakan lemahnya pemasaran, banyaknya produk yang dihasilkan tidak diimbangi dengan kemampuan dalam memperluas akses pasar, sehingga lemahnya akses pasar ini berdampak pada sempitnya peluang pasar bagi UMKM.

Kata Kunci : Governabilitas, Pemerintah Kalurahan, Pengembangan, UMKM

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRACT	ix
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12

F. Literatur Review	13
G. Kerangka Konseptual	17
1. Governabilitas	17
2. Pemerintah Desa	20
3. Pengembangan	25
4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	29
H. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	35
2. Lokasi Penelitian.....	36
3. Obyek Penelitian.....	36
4. Subyek Penelitian	37
5. Teknik Penentuan Informan.....	38
6. Teknik Pengumpulan Data.....	40
7. Teknik Analisis Data	49
 BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	51
A. Sejarah Kalurahan Wonokerto.....	51
B. Kondisi Geografis.....	52
C. Kondisi Demografi	57
D. Kondisi Sosial.....	65
E. Kondisi Budaya	65
F. Kondisi Ekonomi.....	67
G. Sarana dan Prasarana	69
H. Pemerintah Kalurahan Wonokerto	71

BAB III ANALISIS DATA	75
A. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM Melalui Penyediaan Pelatihan dan Menjalin Kerjasama Dengan Pihak Luar	76
B. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM Melalui Fasilitasi Kegiatan Pemasaran dan Bantuan Alat Produksi Bagi Pelaku UMKM	85
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Informan	38
Tabel II.1 Luas Wilayah Kalurahan Wonokerto	55
Tabel II.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	59
Tabel II.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	61
Tabel II.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	63
Tabel II.6 Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Wilayah Kalurahan Wonokerto	53
Gambar II.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan Wonokerto.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentu membawa angin segar bagi desa yang sudah sekian lama sejak Indonesia berdiri selalu menjadi obyek dari pemerintah supradesa. Kini desa telah berubah. Desa tidak lagi menjadi obyek dari pembangunan tetapi menjadi ruang partisipasi publik yang langsung dan nyata terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama sebagai subyek dari pembangunan itu sendiri. Sementara itu, dari sisi kewenangan desa telah diberikan kewenangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa memiliki empat kewenangan, meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu merupakan suatu hak dan kekuasaan yang dipunya untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan pada pengertian tersebut kewenangan desa merupakan suatu elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan lokal di wilayahnya sesuai dengan

potensi dan karakteristik masyarakat. Menurut Sukasmanto dan Dina Mariana, bahwa istilah mengatur merujuk pada tindakan menetapkan norma hukum di desa tersebut. Sedangkan, istilah mengurus merupakan tindakan tanggung jawab desa dalam memperhatikan, melindungi, dan melayani kepentingan masyarakat desa (Sanyoto, 2020:113).

Desa merupakan sebagai suatu wahana politik yang paling dekat yang menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai bagian dari birokrasi memiliki sejumlah tugas seperti menjalankan birokratisasi ditingkat desa, melaksanakan program-program pembangunan, dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sekitar (Fairus, 2020:75). Selain itu, tugas pokok pemerintah desa adalah melaksana kewenangan desa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Tugas pokok tersebut antara lain melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan paling dekat dengan masyarakat serta menjadi tonggak utama dalam mencapai keberhasilan semua program pemerintah. Terdepan mempunyai makna bahwa pemerintah desa berhubungan secara langsung dengan warga baik itu dalam bidang pelayanan, pembangunan, maupun pemberdayaan. Sedangkan, paling dekat berarti secara administratif dan geografis, mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut

dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa yang merupakan sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan desa. Adapun, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa mempunyai peran yang penting dalam mengatur dan mengurus wilayahnya. Peran pemerintah desa, dalam hal ini yakni kepala desa bersama dengan perangkatnya yaitu memiliki peran dalam mengelola sumber daya yang ada di desa, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Semua desa tentu memiliki potensinya masing-masing yang dapat dikembangkan. Tetapi, pengelolaan sumber daya yang ada di desa haruslah dirumuskan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Apabila, pemerintah desa mampu mengelola potensi sumber daya yang ada di desa, serta mengembangkannya dengan baik maka akan menghasilkan manfaat bagi pemerintah desa dan juga mendatangkan kesejahteraan bagi warga.

Disisi lain, pemerintah desa juga harus mempunyai kapasitas yang memadai dalam memberikan dukungan atau intervensi terhadap program-program yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa, salah satunya yaitu dengan mendukung kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di desa melalui penyelenggaraan program pengembangan untuk para pelaku UMKM. Menurut Mulyadi Nitiusantro, pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk memberdayakan suatu usaha

melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing sebuah usaha (Abdurohim, 2021:208). Dengan demikian, pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di desa merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan terutama dalam rangka peningkatan kemampuan maupun keterampilan serta untuk mengatasi permasalahan lainnya yang dihadapi oleh UMKM.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketergantungan masyarakat desa terhadap berbagai produk barang dan jasa dari luar semakin tinggi dan seolah tidak terkendali. Limbah kekayaan sumber daya lokal menjadi terbengkalai dan kurang diperhatikan sehingga pemanfaatannya belum optimal. Tak jarang, akibat dari permasalahan ini akhirnya menjadikan perubahan pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif dan lebih memilih produk atau barang dari luar tanpa ada keinginan untuk memproduksi sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Sementara, disisi lain produk UMKM juga tidak dapat mengiringi kecepatan laju kenaikan ekonomi global dan hal ini juga disebabkan karena berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Sebagai konsekuensinya banyak pelaku UMKM yang berada di desa terpaksa tidak dapat menjalankan usahanya lagi.

Kalurahan Wonokerto, merupakan salah satu kalurahan yang berada di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di

Kalurahan Wonokerto, UMKM merupakan sebagai basis ekonomi bagi warga sekitar sehingga sebagian penduduknya adalah sebagai pelaku UMKM. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Lurah Wonokerto, produk yang telah dihasilkan oleh UMKM diantaranya yaitu berupa produk-produk olahan dari salak. Salak merupakan sebagai salah satu potensi disektor pertanian yang cukup banyak diminati dan sekaligus sebagai matapencaharian bagi warga sekitar. Oleh karena itu, dengan adanya potensi produksi salak yang cukup besar, menjadikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan berbagai jenis produk olahan dari salak. Selain itu, produk-produk UMKM lainnya yaitu berupa kerajinan, kuliner dan berbagai produk lainnya.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang disingkat dengan UMKM menjadi salah satu bisnis yang cukup banyak diminati oleh masyarakat dan sekaligus merupakan sebagai sumber pendapatan bagi warga sekitar. Untuk itu, UMKM memiliki peran yang sangat strategis dan berkontribusi besar sebagai penopang perekonomian warga. Tetapi, di sisi lain dalam menjalankan usahanya tidak jarang pelaku UMKM yang berada di Kalurahan Wonokerto juga dihadapkan dengan berbagai kendala atau permasalahan yang dapat menghambat berjalannya usaha yang sedang dibangun. Jika, permasalahan yang sedang dihadapi oleh UMKM tidak segera diatasi dan dibiarkan begitu saja maka akibatnya perekonomian masyarakat pun akan semakin merosot karena tidak dapat menjalankan

bisnis dan memperoleh keuntungan lagi yang pada akhirnya tingkat pengangguran pun menjadi semakin tinggi.

Adapun, permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM yang terdapat di Kalurahan Wonokerto yaitu lemahnya relasi pasar yang dimiliki oleh pelaku UMKM, sehingga mengakibatkan daya edar produk tidak dapat dijangkau secara luas. Kelemahan akses pasar merupakan persoalan yang serius dan bahkan hampir seluruh pelaku UMKM yang ada di Indonesia juga mengalami hal tersebut. Pada saat menghadapi permasalahan inilah, UMKM terlihat begitu lemah, dimana mereka masih saja kurang memiliki informasi terkait dengan pasar mana saja yang dapat ditembus oleh produk yang mereka hasilkan. Bahkan, dengan produksi yang cukup bagus sekalipun, namun apabila relasi pasar yang terbatas tidak akan cukup membantu untuk pengembangan UMKM. Oleh karena itu, meskipun UMKM di Kalurahan Wonokerto dapat menghasilkan suatu produk yang mempunyai kualitas tinggi, tetapi terkendala karena relasi atau akses yang kurang maka akan menjadi amat disayangkan. Melalui wawancara yang dilakukan, Lurah Wonokerto juga menambahkan bahwa kelemahan akses pasar yang dihadapi oleh UMKM ini disebabkan karena kurangnya pemasaran yang dilakukan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam perkembangan dunia bisnis, pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang untuk mempromosikan suatu produk yang telah dihasilkan kepada khalayak umum guna mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Dengan demikian, pemasaran

merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam menjaga kelancaran dalam suatu usaha. Sebab, ketika tingkat aksebilitas pemasaran semakin baik, maka kemungkinan besar produk yang dihasilkan juga akan dapat dengan mudah terserap oleh pasar. Meskipun kegiatannya hanya memasarkan tetapi implementasinya secara langsung cukuplah sulit. Terutama bagi pelaku UMKM yang kurang memiliki inovasi ataupun penguasaan terhadap teknologi dalam memasarkan produk yang dihasilkannya. Mengingat pada masa sekarang, penggunaan teknologi merupakan salah satu sarana yang kerap kali digunakan berbagai pengusaha untuk memasarkan produknya dan sekaligus sebagai salah satu cara yang sangat strategis untuk mengatasi lemahnya akses pasar. Namun, sebagian dari pelaku UMKM di Kalurahan Wonokero tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana memasarkan produk-produk mereka. Oleh karena itu, kurangnya informasi mengenai pasar untuk memasarkan produk-produk yang telah dihasilkan menjadikan UMKM tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangan usaha dapat mengalami stagnasi serta mengakibatnya UMKM sulit untuk berkembang.

Selain permasalahan terbatasnya akses pasar dan minimnya pemasaran, disisi lain UMKM yang berada di Kalurahan Wonokerto juga dihadapkan pada permasalahan kurangnya pendampingan dari pemerintah kepada pelaku UMKM. Padahal, dukungan berupa pendampingan usaha dari pemerintah sangatlah penting dalam mendorong keberhasilan UMKM.

Melalui pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah, kegiatan usaha pelaku UMKM dapat lebih terarah dan ketika terdapat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM maka akan dapat segera dipecahkan sehingga kegiatan UMKM pun dapat berjalan dengan lancar. Namun, kenyataannya sangat disayangkan bahwa UMKM yang berada di Kalurahan Wonokerto belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Untuk itu dalam pengembangan UMKM perlu adanya keberpihakan dari pemerintah. Keberpihakan yang dimaksud adalah bukan berarti untuk memenangkan yang lemah, tetapi keberpihakan dalam artian pemerintah melakukan berbagai program atau kegiatan guna mendukung kegiatan perekonomian masyarakat agar lebih berdaya sehingga masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat dengan leluasa mengembangkan berbagai usaha yang mereka tekuni.

Dengan demikian, berdasarkan atas permasalahan yang terjadi pada UMKM di Kalurahan Wonokerto yaitu lemahnya akses pasar yang dimiliki, minimnya pemasaran dalam mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM, dan kurangnya pendampingan untuk pelaku UMKM maka pemerintah kalurahan dituntut untuk memiliki kapasitas atau kemampuan dalam memecahkan realita permasalahan yang sedang masyarakat alami khususnya terhadap pelaku UMKM. Sebab, dalam kondisi seperti itu, UMKM tidak akan mampu meningkatkan kemampuan dan daya saingnya tanpa adanya keterlibatan dari pemerintah kalurahan untuk mendukung pengembangan UMKM yang ada di Kalurahan Wonokerto.

Oleh karena itu, kemampuan atau governabilitas pemerintah menjadi tolak ukur keberhasilan UMKM untuk terus tetap bertahan dan berkembang dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam hal ini harus dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh pelaku UMKM dengan mengefektivitas penggunaan otoritas atau kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, governabilitas atau kapasitas kepemimpinan dari pemerintah Kalurahan Wonokerto sangat berpengaruh terhadap sejauh mana kemampuan pemerintah kalurahan untuk dapat mampu mendorong pengembangan UMKM ke arah yang lebih baik.

Untuk mendorong pengembangan UMKM, langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah Kalurahan Wonokerto salah satunya yaitu dengan memfasilitasi para pelaku UMKM. Memfasilitasi dalam artian yaitu pemerintah kalurahan dapat menyediakan pelatihan dan melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah kalurahan juga dapat memfasilitas pelaku UMKM untuk dapat menembus pangsa pasar yang lebih luas lagi dengan melakukan atau menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Lebih lanjut, untuk mendukung pengembangan UMKM agar berdaya saing dan mampu bertahan, pemerintah kalurahan juga harus melindungi usaha-usaha kecil masyarakat dengan membuat regulasi atau kebijakan sebagai bentuk proteksi dan keberpihakan pemerintah Kalurahan Wonokerto terhadap pelaku UMKM.

Melalui tindakan dan perbuatan pemerintah tersebut, dalam istilah lainnya adalah *governing* yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat inilah yang menjadi tolak ukur dalam melihat kapasitas atau governabilitas pemerintah Kalurahan Wonokerto untuk mampu mengatasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadap oleh UMKM. Hal ini, senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kooiman (dalam Tryatmoko, 2010:38), bahwa *governability* merupakan sebagai kemampuan *governing*. Sehingga, untuk melihat bagaimana kapasitas atau governabilitas dari pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM tersebut, maka penting untuk melacak apa saja tindakan atau perbuatan (*governing*) yang telah dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Wonokerto.

Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang governabilitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dapat dikemukakan bahwa penelitian ini memfokuskan pada governabilitas atau kapasitas pemerintah kalurahan dalam melakukan pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat di Kalurahan Wonokerto dalam rangka

untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan daya saing UMKM sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan ruang lingkup pada penelitian agar lebih mudah untuk dipahami. Adapun, ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM melalui penyediaan pelatihan dan menjalin kerjasama dengan pihak luar.
2. Kapasitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM melalui fasilitasi kegiatan pemasaran dan bantuan alat produksi bagi pelaku UMKM.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Mengapa kapasitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Wonokerto belum maksimal?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui governabilitas pemerintah desa dalam mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan pemerintah kalurahan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema yang sama, serta dapat memperluas pemahaman dan wawasan keilmuan pada kajian ilmu pemerintahan mengenai governabilitas pemerintah kalurahan khususnya dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi masukan dan manfaat yang positif bagi berbagai pihak yang memiliki peran dan terlibat secara langsung dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya bagi pemerintah Kalurahan Wonokerto.

F. Literatur Review

Literatur review pada prinsipnya adalah aktivitas melakukan tinjauan terhadap berbagai literatur, karya, atau hasil peneltian terdahulu yang mengkaji topik yang sama atau mendekati topik yang akan diteliti. Dengan demikian, pada literatur review ini akan membuat tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki kaitan dengan governabilitas (kapasitas), pemerintah kalurahan, dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Feni Dwi Anggraeni, dkk (2013), yang meneliti tentang pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal (studi kasus pada kelompok usaha “emping jagung” di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang). Adapun, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengembangan secara internal dari kelompok usaha “Emping Jagung” dalam meningkatkan potensi serta kemajuan usahanya dengan cara menggunakan modal awal dengan tabungan sendiri, melakukan inovasi untuk hasil produksinya, memperluas jaringan pemasaran, dan melengkapi sarana dan prasarana usahanya. Selain itu, fasilitas dari pihak eksternal yaitu Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang telah membantu dalam pengembangan UMKM emping jagung seperti memberikan akses UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, mengadakan pembinaan dan pelatihan, kegiatan promosi produk, memperluas pemasaran produk, serta menyediakan sarana dan

prasarana. Namun, diketahui bahwa hasilnya belum merata dan beberapa pengusaha terkendala dengan meningkatnya harga bahan baku, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya akses pemasaran produk.

Kedua, penelitian yang dilakukan Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah (2014), yang meneliti tentang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penanggulangan kemiskinan. Adapun, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas pada pemberian modal usaha dan kurang maksimalnya bantuan pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam pemberdayaan UMKM ini yang menjadi faktor penghambatnya adalah infrastruktur yang kurang memadai atau rusak, kurang maksimalnya bantuan dari pemerintah, tidak adanya tempat pembuangan limbah, dan tidak adanya sentra pemasaran hasil produk. Disisi lain, terdapat pula faktor pendukungnya yaitu tersedianya sumber daya manusia yang melimpah atau tenaga kerja yang memadai, bahan baku yang mudah ditemukan dan murah, modal usaha yang ringan, mendapat dukungan aparatur desa, *supplay* bahan baku lancar dari pemasok, dan adanya kesepakatan harga jual produksi antara kelompok usaha Panguyuban Kembang Waru.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hanantyo Sri Nugroho (2018), meneliti tentang democratic governance (studi mengenai *governability*

dalam pengembangan UMKM berbasis e-commerce di Kota Yogyakarta).

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada peran pemerintah dalam melakukan program pemberdayaan UMKM berbasis e-commerce, serta peran pemerintah dalam menggunakan ruang dialog. Adapun, hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan pengembangan UMKM dengan berbasis e-commerce linier terhadap kualitas democratic governance, yakni pemberdayaan dan partisipasi. Selain itu, dalam penggunaan ruang dialog terdapat perasaan ewuh-pekewuh (sungkan). Perasaan ini memiliki kelebihan dalam meredam konflik dan menjaga konsensus yang telah disepakati. Namun, disisi lain perasaan ini kemudian tidak melahirkan sifat partisipatif dalam memanfaatkan ruang publik untuk memperbaiki pengembangan UMKM. Dengan demikian, pemanfaatan ruang publik lebih digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan implementasi kebijakan maupun program.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Maria Vinsensia Beku (2021) yang melakukan penelitian tentang kapasitas pemerintah desa dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini lebih memfokuskan pada kapasitas atau kemampuan pemerintah Desa Towangsa dalam pelaksanaan dan pengelolaan UMKM untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun, hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM) di Desa Towangsa dinilai masih kurang peka, cekatan, kreatif dan inovatif dalam melakukan pengembangan UMKM.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Meri Andani (2021), yaitu meneliti dan sekaligus memfokuskan penelitian terkait dengan kapasitas pemerintah desa dalam pemberdayaan UMKM produk olahan salak di Kalurahan Wonokerto. Adapun, hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam pemberdayaan UMKM produk olahan salak masih sangat lemah karena masih dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan di UMKM belum dapat berjalan. Hal ini disebabkan karenakan perencanaan yang telah dibuat tidak didukung dengan pelaksanaan seperti pelatihan, pengorganisasian, serta memfasilitasi UMKM produk olahan salak. Selain itu, pelatihan pelatihan yang dilakukan tidak sesuai pada pengelolaan produk salak dan pemasaran yang pernah dilakukan sebelumnya tidak dilanjutkan lagi.

Berdasarkan dari beberapa kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), maka dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya oleh peneliti mempunyai fokus penelitian dan permasalahan yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dengan demikian, melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan fokus penelitian dan permasalahan yang berbeda inilah yang menjadikan jalan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang governabilitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM.

G. Kerangka Konseptual

1. Governabilitas

Governability atau governabilitas merupakan suatu konsep yang mulai marak dipakai oleh para akademisi mulai tahun 1970-an. Konsep ini dipakai oleh Huntington, Crozier dan Watanuki dalam menjelaskan kondisi pemerintahan dan demokrasi di Eropa, Amerika, dan Jepang pada waktu itu. Mereka menjelaskan mengenai kondisi ketidakpuasan masyarakat terutama di negara-negara trilateral (Eropa, Amerika, dan Jepang) karena terjadi pelemahan fungsi institusi-institusi pemerintahan demokratis. Pelemahan itu mereka sebut sebagai krisis *governability*, dimana mesin demokrasi tetap beroperasi, tetapi kemampuan individu-individu yang mengoperasikan mesin tersebut untuk membuat keputusan-keputusan cenderung melemah (Tryatmoko, 2010:38).

Mesin politik merupakan suatu lembaga formal atau resmi yang dengan absah mengidentifikasi berbagai masalah, menentukan dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan umum (Rosana, 2012:147). Sebagai suatu lembaga yang ada dalam negara dan memiliki pengaruh secara langsung dalam pembuatan keputusan politik negara maka kemampuan atau kapasitas dari pemerintah haruslah memadai. Tanpa adanya kapasitas yang memadai mereka tidak akan dapat menjalankan tugas dan juga fungsi mereka pada tiap-tiap institusi dengan baik. Jika hal ini terjadi, maka pemerintah sering dianggap gagal memenuhi

harapan masyarakat yang mereka pimpin, seperti yang ditunjukkan oleh banyak analisis tentang keadaan yang lemah, tidak stabil, runtuh ataupun gagal yang mana negara tidak dapat memerintah secara efektif. Senada dengan hal tersebut, Tryatmoko (2010:37) dalam jurnalnya yang membahas tentang “Pemekaran Daerah dan Persoalan *Governability* Lokal di Indonesia” menjelaskan bahwa sebagian besar elite hanya cenderung memperhatikan kekuasaan daripada kemampuan mereka untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Kondisi seperti inilah yang dikatakan sebagai persoalan *governability*.

Tryatmoko (2010:38) juga mengutip pendapat Kooiman, bahwa governabilitas merupakan sebagai kemampuan memerintah. Namun, secara lebih terperinci Kooiman menjelaskan governabilitas sebagai proses keseimbangan yang permanen antara dua hal yaitu *needs* dan *capacities*. Menurutnya, *need* dan *capacities* di dalamnya terdapat interaksi dan hubungan yang saling ketergantungan. Misalnya, antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat yang didalam tentu mempunyai hubungan yang saling ketergantungan.

Governabilitas menyarankan untuk menghubungkan tiga komponen utama yakni masyarakat, pemerintah, dan hubungan antara keduanya (Kooiman, dkk, 2008:3). Ini berarti bahwa hubungan antara kebutuhan (problem) dan kapasitas (solusi) membawa suatu interaksi dan dinamika di dalamnya.

Pierre dan Peters juga memiliki pendapat yang sama dengan Kooiman (Tryatmoko, 2010:39), menurut mereka kapasitas yang adaptif dari institusi-institusi politik merupakan suatu aspek yang penting, terutama bagi negara untuk dapat menyediakan arah dalam proses memerintah. Dalam pengertian lain, proses memerintah merepresentasikan seperangkat adaptasi yang berkelanjutan dari aktivitas politik untuk perubahan dalam lingkungan. Oleh karena itu, dimensi dari governabilitas tidak hanya memfokuskan pada keberadaan *society*, tetapi juga lebih penting dari itu adalah hubungan antara *state* dan *society*. Beberapa elemen governabilitas tersebut adalah responsive (cepat tanggap), jaringan, dan regulasi.

Berdasarkan pada beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh Kooiman, Pierre dan Peters dapat disimpulkan bahwa governabilitas adalah tidak hanya sekedar membahas terkait dengan kekuasaan, tetapi lebih kepada kemampuan dari pemerintah untuk memerintah, dan juga perlu melihat dari sudut masyarakat dan pemerintah hubungan yang saling ketergantungan antara kedua belah pihak. Dari sudut masyarakat, legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap yang memerintah adalah hal yang utama. Disisi lain, hubungan yang saling ketergantungan antara pemerintah dan masyarakat juga berasal dari adanya regulasi yang telah ditetapkan. Melalui adanya regulasi, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terutama untuk meningkatkan

produktifitas dan memaksimalkan sumber daya dan segala potensi yang terdapat dalam wilayahnya khususnya yaitu desa guna meningkatkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik. Senada dengan hal tersebut, maka governabilitas pemerintah Kalurahan Wonokerto akan dapat terlihat dari sejauh mana kapasitas pemerintah untuk mampu mengatasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadap oleh UMKM.

2. Pemerintah Desa

Sugiman (2018:83) mengutip pendapat Kansil, bahwa kata pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah dalam arti “organ” atau alat negara, dapat dibedakan menjadi dua yakni pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya menyangkut kekuasaan eksekutif. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).

Pada umumnya, yang disebut dengan pemeritah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Adapun, wewenang atau kekuasaan yang diberikan pada sekelompok individu tersebut dilandasi oleh legitimasi atau dukungan dan pengakuan dari entitas sosial. Melalui legitimasi inilah pemerintah memperoleh wewenang yang sah dalam menjalankan

tugas dan fungsinya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Sedangkan, kata desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *dhesi* yang artinya tanah kelahiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Sistem merupakan suatu kesatuan unsur, komponen, maupun sub-sub sistem yang saling berhubungan dan terintegrasi serta berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Desa sebagai sistem pemerintahan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan memiliki bentuk serta struktur pemerintahan sendiri yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan terdiri dari komponen internal atau yang dikenal sebagai istilah infrastruktur pemerintahan maupun eksternal yang dikenal dengan istilah suprastruktur pemerintahan (Sanyoto, 2020:4). Infrastruktur pemerintahan desa adalah kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan desa. Sedangkan, suprastuktur pemerintahan desa adalah terdiri dari camat beserta perangkatnya, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Dengan demikian, sistem pemerintahan desa dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat, sesuai dengan

amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, pemerintah desa merupakan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang yang mempunyai wewenang dalam menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawabnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan warga desa berdasarkan pada hak asal usul dan adat istiadat desa yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan kepada camat atas nama bupati/wali kota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintah desa merupakan sebagai unit terdepan dan paling dekat dengan masyarakat serta berhadapan langsung dalam melaksanakan tanggung jawab untuk memperhatikan, melindungi, dan melayani kepentingan warga desa. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki tugas pokok sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tugas tersebut antara lain adalah melaksanakan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Mustakim, 2015:14).

- a. Dibidang pemerintahan desa, kewenangan lokal skala desa meliputi penetapan dan penegasan batas desa; pengembangan sistem administrasi dan informasi desa; penetapan organisasi pemerintah desa; penetapan BUMDesa; penetapan APB desa; penetapan peraturan desa dan lain sebagainya.
- b. Dibidang pembangunan desa, kewenangan lokal berskala desa meliputi pelayanan dasar desa; sarana dan prasarana desa; pengembangan ekonomi lokal desa; dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa.
- c. Dibidang pembinaan kemasyarakatan desa kewenangan lokal berskala desa meliputi membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa; membina kerukunan warga masyarakat desa; memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa; dan melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.
- d. Sedangkan kewenangan lokal berskala desa dibidang pemberdayaan masyarakat antara lain pengembangan seni budaya lokal; pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; fasilitasi kelompok-kelompok

masyarakat; fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel dan lain-lain.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemerintah desa menjadi tonggak utama dalam mencapai keberhasilan semua program pemerintah, sebab pemerintah desa menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan kegiatan yang dijalankan. Selain pemerintah desa, terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya terdiri dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD harus dimaknai sebagai mitra pemerintah desa dan kedudukannya adalah sejajar, bukan berada di atas ataupun di bawah pemerintah desa. Keberadaan BPD adalah sebagai bentuk *check and balances* terhadap penyelenggaran pemerintahan desa agar lebih terarah dan terkontrol. Hubungan kemitraan artinya pihak pertama yakni pemerintah desa dan pihak kedua yakni BPD memiliki posisi yang selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Menurut Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa.

Sebagai mitra pemerintah desa, BPD mempunyai kewenangan untuk ikut serta berpartisipasi dalam membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, BPD juga bertugas untuk menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Hal ini merupakan sebagai salah satu cara untuk memperkuat partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam kegiatan pembangunan desa, sehingga melalui fungsi BPD tersebut baik kebijakan maupun program yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dapat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan atau aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya, fungsi BPD yang terakhir adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Pengawasan yang dilakukan yaitu agar meminimalisir terjadinya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Pengembangan

Abdurohim (2021:208) mengutip pendapat Hafsah, bahwa pengembangan adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan

informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan. Sedangkan, Sukiman berpendapat bahwa pengembangan adalah kegiatan yang meliputi tiga tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang diikuti dengan kegiatan penyempurnaan sehingga diperoleh bentuk yang dianggap memadai (Abdurohim, 2021:208).

Menurut Anoraga (2007:66), pengembangan usaha merupakan suatu cara atau proses memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan meningkatkan perluasan usaha serta kualitas dan kuantitas produksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan padangan ke depan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha yang besar. Abdurohim (2021:208) juga mengutip pendapat Mulyadi Nitiusantro, bahwa pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk memberdayakan suatu usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing sebuah usaha.

Berdasarkan pada uraian konsep di atas, pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu upaya atau strategi yang dilakukan dalam rangka untuk memberdayakan atau

membawa suatu perubahan terhadap level usaha ke arah yang lebih baik melalui peningkatan perluasan usaha, kualitas produksi, dan terutama terhadap peningkatan kemampuan atau *skill* sumber daya manusia sebagai pelaku UMKM dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satu kunci keberhasilan suatu usaha adalah terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Namun, secara umum fakta di lapangan menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yakni pengelola UMKM masih tergolong rendah. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberikan pelatihan, pendampingan dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Sumber daya manusia merupakan sebagai subyek yang terpenting dalam pengembangan UMKM, sebab dalam kasus UMKM harus diakui bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih dihadapkan pada berbagai kendala yang belum dapat tertangani dengan baik misalnya tingkat kemampuan, keterampilan, dan keahlian sumber daya manusia yang

relatif masih rendah. Berbagai kajian menyatakan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan sebagai suatu penghalang bagi banyak industri kecil di Indonesia, terutama dalam aspek manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, teknik pemasaran, dan kajian pasar. Padahal, semua keterampilan dalam berbagai aspek tersebut sangatlah penting dan diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperluas pangsa pasar, bahkan dapat menembus pasar baru (Budiarto, dkk, 2019:27).

Disisi lain, pengembangan UMKM dibidang sumber daya manusia sangatlah diperlukan dalam menghadapi persaingan terbuka di pasar global. Para pelaku UMKM tidak hanya dituntut untuk dapat memproduksi saja, tetapi juga harus dapat mengembangkan usaha dari berbagai sisi. Sebagai contoh, kualitas sumber daya manusia akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang pelaku usaha dapat mengembangkan produknya dengan mengikuti trend atau selera pasar, serta memahami bagaimana cara melakukan pemasaran melalui media-media teknologi, dan lain sebagainya.

Untuk membentuk UMKM yang unggul dan mandiri, maka pengembangan UMKM tidak dapat hanya dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Tetapi, pengembangan UMKM harus dilakukan secara berkesinambungan antara program-program yang akan dijalankan agar pengembangan UMKM untuk meningkatkan taraf usaha yang lebih

baik dapat berlangsung secara terus-menerus. Melalui program yang berkelanjutan diharapkan permasalahan UMKM dapat digarap secara tuntas. Mulai dari identifikasi permasalahan, perencanaan, pelakasanaan, hingga tahap evaluasi. Dengan demikian, keseluruhan program akan menggarap satu siklus penuh dari suatu permasalahan. Selanjutnya, dalam melaksanakan program pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu melibatkan berbagai institusi, baik itu dari perguruan tinggi, pemerintah desa ataupun daerah, serta stakeholder lainnya untuk mendukung program yang akan dijalankan.

Pengembangan UMKM diarahkan agar UMKM menjadi semakin kokoh sebagai kekuatan utama penyangga perekonomian Indonesia. Selain itu, pengembangan yang dilakukan juga bertujuan agar UMKM mampu memproduksi dan memasok sebagian besar kebutuhan dalam negeri dengan produk barang maupun layanan hasil karya anak bangsa sendiri. Sehingga, dengan adanya pengembangan terhadap UMKM maka UMKM dapat bertahan dan kokoh sebagai pilar kemandirian bangsa.

4. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Konsep umum UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Sehingga, UMKM dapat dijelaskan sebagai

perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Menurut Rudijito, UMKM merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan pekerjaan baru dan juga dapat menaikan devisa negara melalui pajak badan usaha (Abdurohim, 2021:2).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Bab 1 Pasal 1, definisi UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai berikut.

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).

Berdasarkan pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dan didasarkan dengan memiliki kriteria modal usaha dengan batasan-batasan tertentu.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sebagai salah satu tonggak perekonomian bagi masyarakat. Di sisi lain, UMKM juga mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM mengalami kenaikan yaitu sebesar 64,1 juta dan diperkirakan akan terus bertumbuh. Dari data tersebut membuktikan bahwa UMKM mampu menjadi salah satu solusi pertumbuhan angkatan kerja baru di Indonesia dengan jumlah penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi.

Disisi lain, dengan perannya yang sangat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja juga menjadikan UMKM sebagai alternatif untuk membantu memerangi kemiskinan dan menurunkan angka tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Selain itu, UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan UMKM berbeda dengan perusahaan besar yang mana UMKM dapat tumbuh diberbagai tempat termasuk di daerah yang jauh sekalipun dari pusat kota. Melalui keberadaan UMKM yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, mampu

menjadi bisnis UMKM sebagai sarana untuk memeratakan tingkat perekonomian masyarakat di berbagai wilayah.

Namun, meskipun UMKM memiliki peran yang sangat penting dan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia, tetapi UMKM juga rentan mengalami permasalahan yang kerap timbul saat beroperasi. Permasalahan tersebut antara lain kurangnya inovasi dalam pengembangan produk, keterbatasan sumber pembiayaan, kurangnya relasi atau akses pasar yang luas sehingga daya edar produk UMKM pun tidak dapat dijangkau secara luas oleh masyarakat luar, kurangnya kemampuan atau *skill* dalam memanfaatkan teknologi yang ada untuk memasarkan produk-produk UMKM.

Dengan demikian, berdasarkan atas permasalahan tersebut seperti halnya yang terjadi pada UMKM di Kalurahan Wonokerto maka governabilitas pemerintah menjadi tolak ukur keberhasilan UMKM untuk terus tetap bertahan dan berkembang dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kalurahan Wonokerto dalam hal ini harus dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, salah satunya yaitu dapat dilakukan melalui pengembangan UMKM. Mengingat, UMKM merupakan usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap masyarakat dan melalui UMKM juga masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah dapat masuk dalam dunia kerja, sehingga angka pengangguran dan tingkat kemiskinan pun dapat ditekan. Di Kalurahan Wonokerto, UMKM

menjadi salah satu sumber pemasukan bagi masyarakat bahkan lewat UMKM bahan-bahan baku lokal yang dekat di sekitar masyarakat akhirnya dapat dimanfaatkan dan diproses menjadi bahan yang memiliki nilai jual. Disisi lain, produk dan jasa UMKM rata-rata memiliki harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat terutama oleh masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah. Dengan harganya yang terjangkau tentu dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

H. Metode Penelitian

Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow (dalam Sugiyono 2020:2), menyatakan bahwa penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya Creswell berpendapat bahwa metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan pada pendapat tersebut, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis artinya proses yang

digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Walaupun langkah-langkah penelitian antara metode kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi berbeda, tetapi semuanya dilakukan secara sistematis (Sugiyono, 2020:2-3).

1. Jenis Penelitian

Sebelum terjun ke lapangan, menentukan jenis penelitian merupakan bagian yang paling penting, karena penentuan jenis penelitian akan berpengaruh terhadap keseluruhan perjalanan penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan jenis penelitian kualitatif eksplanatif. Eksplanatif merupakan penelitian yang akan menjelaskan hal-hal dibalik fenomena atau dibalik sesuatu yang terjadi sehingga peneliti dapat mengetahui alasan mengapa fenomena itu terjadi. Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow, menyatakan bahwa penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif (Sugiyono, 2017:39-40).

Menurut Bogdan dan Biklen, karakteristik penelitian kualitatif yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah seorang peneliti langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci, data yang terkumpul dalam penelitian kualitatif lebih berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekan pada angka (Sugiyono, 2017:40).

Berdasarkan pada pendapat di atas maka dapat dikemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan

data yang dinarasikan berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian ini cocok diterapkan pada kondisi dimana masalah dalam penelitian belum jelas, dengan begitu peneliti kualitatif akan langsung masuk ke obyek, melakukan penjelajahan dengan *grant tour question* sehingga masalah akan dapat ditemukan dengan jelas.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi dan lokasi penelitian tersebut menggambarkan situasi sosial (Nasution, 2003:43). Dengan demikian, lokasi pada penelitian ini yaitu di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Obyek Penelitian

Sugiyono (2017:38), obyek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian, obyek penelitian dalam melaksanakan penelitian ini adalah peneliti akan mengkaji terkait dengan kapasitas pemerintah Kalurahan Wonokerto. Kapasitas dalam artian bahwa bagaimana kemampuan pemerintah kalurahan dalam mendorong berbagai kegiatan perekonomian masyarakat salah satunya yaitu usaha mikro, kecil dan menengah. Untuk itu, perkembangan

UMKM yang semakin baik atau malah sebaliknya, tentunya hal ini tidak terlepas dari pengaruh dari kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah kalurahan.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pihak-pihak yang akan memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Pada penelitian ini, jumlah informan yaitu terdiri dari 6 orang. Adapun, yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Wonokerto, yang akan memberikan informasi berkaitan dengan governabilitas pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengurus UMKM Kalurahan Wonokerto yang akan memberikan informasi seputar seperti kondisi dan jumlah UMKM yang berada di Kalurahan Wonokerto, dan pelaku UMKM yang akan memberikan informasi mengenai sejauh mana mereka menilai terhadap kapasitas pemerintah kalurahan dalam melakukan pengembangan UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel I.1
Data Informan

No	Nama	Umur	Pekerjaan	JK
1	Riyanto Sulistyo Budi, S.E	45	Lurah Wonokerto	L
2	Siti Mubarokah	46	UMKM Olahan Salak (Ketua UMKM)	P
3	Karyati	49	UMKM Olahan Salak	P
4	Heni Sulistyawati	37	UMKM Kerajinan Kulit	P
5	Erna Purwaningsih	44	UMKM Olahan Salak	P
6	Rita Permana Sari	32	UMKM Kerajinan	P

Sumber : Data primer 2022

5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data atas pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2020:289). Dalam penelitian ini, peneliti membatasi dan mengambil hanya beberapa orang informan. Informan ini dianggap mengetahui informasi berkaitan dengan kajian penelitian. Adapun, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemerintah Kalurahan Wonokerto = 1 orang
 - b. Pengurus UMKM Kalurahan Wonokerto = 1 orang
 - c. Masyarakat Pelaku UMKM = 4 orang
- Total = 6 orang

Pemilihan informan yaitu sebanyak 6 orang. Peneliti mengambil enam informan tersebut dikarenakan data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ingin peneliti kaji sudah cukup sehingga tuntasnya peroleh informasi yang diperoleh membuat peneliti memutuskan untuk mengambil hanya enam informan tersebut. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu metode penetapan sampel penelitian dengan tidak berdasarkan strata, melainkan didasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada permasalahan yang diingin diteliti. Untuk itu, alasan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* karena didasarkan atas pertimbangan tertentu. *Pertama*, pemerintah Kalurahan Wonokerto, karena sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang tentunya mempunyai tugas dalam merespon kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa, salah satunya yaitu pelaku UMKM maka tindakan atau perbuatan pemerintah inilah yang menjadi tolak ukur dalam melihat kapasitas dari pemerintah kalurahan dalam mendorong ke arah mana perkembangan UMKM. Untuk itu, pemerintah kalurahanlah yang

lebih mengetahui informasi yang dibutuhkan peneliti terkait dengan tindakan atau upaya apa saja yang telah ditempuh pemerintah kalurahan dalam mendorong pengembangan UMKM. *Kedua*, alasan peneliti memilih pengurus UMKM Kalurahan Wonokerto karena sebagai pengurus tentunya mengetahui terkait dengan bagaimana perkembangan UMKM dan mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah kalurahan. *Ketiga*, alasan peneliti memilih masyarakat pelaku UMKM sebagai informan dikarenakan mereka lah yang menerima dan merasakan program ataupun tindakan yang diambil oleh pemerintah kalurahan untuk mendorong pengembangan UMKM. Dengan demikian, penggunaan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informan pada penelitian ini cocok untuk peneliti gunakan karena informan tersebut dianggap paling tahu tentang permasalahan yang ingin peneliti kaji yaitu terkait governabilitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dilakukannya penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sugiyono (2020:296)

menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.

a. Observasi

Salim dan Syahrum (2012:114), menjelaskan bahwa pengumpulan data dengan menggunakan observasi ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari *setting* tertentu. Adapun menurut Marshall (Sugiyono, 2020:287) melalui kegiatan observasi yang dilakukan, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Dengan demikian, dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian dengan mengamati perilaku dari pemerintah kalurahan saat melakukan wawancara untuk mengetahui kapasitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM, dan aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung dalam masyarakat terutama pelaku UMKM untuk menemukan hal-hal yang belum terungkap sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Pada penelitian ini, untuk memperoleh data observasi peneliti lakukan dengan bersamaan pada saat melakukan wawancara dengan informan. Untuk itu, informasi atau data yang diperoleh peneliti berdasarkan observasi pada saat melakukan penelitian terutama saat mewawancarai pemerintah Kalurahan Wonokerto didapatkan bahwa pemerintah kalurahan cukup kebingungan dalam

menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan. Padahal, pertanyaan tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab dari pemerintah kalurahan yakni sebagai kepala desa atau lurah tentunya pasti lebih mengetahui hal-hal terkait dengan kewenangannya. Sehingga pada saat menjawab pertanyaan, kepala desa atau lurah bertanya ke perangkat desa terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan.

Kemudian, pada saat mendatangi rumah pelaku UMKM termasuk di dalamnya yaitu pengurus UMKM, peneliti mendapati bahwa dalam proses produksi pelaku UMKM hanya bermodalkan alat seadanya seperti kuali, parutan, dan peralatan lainnya. Dapat dibayangkan bahwa, untuk memproduksi produk yang cukup banyak dengan menggunakan alat seadanya tentunya pasti akan menghabiskan waktu yang sangat lama dan hal ini jugalah yang menjadi salah satu penyebab pemasaran melalui penggunaan media online belum sepenuhnya maksimal oleh pelaku UMKM. Sebab, pelaku UMKM lebih banyak menghabiskan waktu untuk proses produksi daripada melakukan pemasaran melalui online. Disisi lain, pelaku UMKM juga tidak semuanya merekrut tenaga bantuan sehingga untuk proses penggerjaan produk-produk pun harus dilakukan sendiri atau dibantu oleh keluarga inti saja.

b. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2020:304), mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Lebih lanjut, Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2020:305) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Jadi, dalam penelitian ini terlebih dahulu peneliti akan menyusun daftar pertanyaan atau pedoman wawancara yang akan ditanyakan kepada informan, kemudian hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap informan akan dicatat. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada :

- 1) Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Fokus pembahasan yaitu peneliti akan menggali informasi yang berkaitan dengan governabilitas pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Wonokerto;
- 2) Pengurus UMKM. Fokus pembahasan yaitu peneliti akan menggali informasi terkait dengan kondisi dan jumlah UMKM yang berada di Kalurahan Wonokerto; dan

3) Pelaku UMKM. Fokus pembahasan yaitu peneliti akan menggali informasi mengenai sejauh mana mereka menilai terhadap kapasitas pemerintah kalurahan dalam melakukan pengembangan UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Data wawancara yang didapatkan oleh peneliti saat pertama kali melakukan wawancara dengan Lurah Wonokerto, yaitu peneliti mendapatkan informasi bahwa UMKM di Kalurahan Wonokerto banyak bergerak dibidang kuliner terutama olahan salak, hal ini dikarenakan salak pondoh merupakan salah satu potensi disektor pertanian. Sehingga dengan potensi tersebut menumbuhkan inovasi dari masyarakat terutama UMKM untuk menjadikan berbagai olahan dari buah salak tersebut. Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa pelaku UMKM masih terkendala dimasalah pemasaran sehingga akses pasar UMKM terbatas dan juga kurangnya pendamping.

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Lurah Wonokerto, diketahui bahwa sebagian pelaku UMKM yang berada di Kalurahan Wonokerto sudah mulai memanfaatkan teknologi dalam proses produksinya. Salah satunya yaitu seperti dalam proses pembuatan produk kripik yang menggunakan *vacuum frying*. Melalui adanya bantuan alat ini akan mampu membantu mendongkrak produktivitas UMKM dan juga tentunya akan

mempermudah serta dapat meringkas waktu produksi. Bahkan pada era saat ini, penggunaan teknologi memang mutlak sangat dibutuhkan terutama dalam upaya untuk meningkatkan daya saing dan kinerja UMKM.

Kemudian berdasarkan wawancara selanjutnya, data atau informasi yang diperoleh peneliti dari informan pada penelitian ini yakni dari pemerintah Kalurahan Wonokerto peneliti dapat mengetahui bahwa dalam kaitannya untuk mendorong pengembangan UMKM, pemerintah kalurahan telah menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak terutama dari dinas-dinas terkait dan juga dari perguruan tinggi. Adapun, bentuk kerjasama tersebut yaitu memberikan pengarahan dan pelatihan kepada pelaku UMKM. Pemerintah kalurahan juga mengungkapkan bahwa telah memberikan bantuan berupa alat kepada pelaku UMKM. Selain itu, untuk mengatasi permasalahan lemahnya pemasaran, pemerintah kalurahan akan memfasilitasi pelaku UMKM dengan membangun stand-stand diberbagai tempat wisata yang berada di Kalurahan Wonokerto. Kemudian, data yang diperoleh melalui wawancara kepada pelaku UMKM maupun pengurus UMKM bahwa dalam menjalankan usahanya pelaku UMKM tidak hanya terkendala karena lemahnya pemasaran tetapi juga dikarenakan faktor lain, seperti kurangnya modal, terbatasnya alat yang digunakan untuk proses produksi, dan juga dikarenakan

situasi pandemi saat ini sehingga memperlambat perkembangan UMKM. Disamping itu, kaitannya dengan penyediaan pelatihan dari pemerintah kalurahan, pelaku UMKM mengungkapkan bahwa pelatihan tersebut belum sepenuhnya menyentuh ke berbagai unit usaha lainnya. Hal ini dikarenakan, pemerintah kalurahan yang kurang menggali lebih dalam mengenai kebutuhan dari berbagai jenis usaha yang berada di Kalurahan Wonokerto. Sehingga, pelatihan yang diberikanpun kurang variatif dan tidak dapat dirasakan kebermanfaatannya oleh pelaku UMKM lainnya. Selain itu, pelaku UMKM juga menungkapkan bahwa penggunaan teknologi dalam melakukan pemasaran produk UMKM menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Pelaku UMKM yang belum mahir menggunakan teknologi, mau tidak mau harus belajar agar dapat bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Apalagi di situasi pandemi saat ini semuanya hampir dilakukan secara online.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk mendukung proses penelitian dan juga untuk mengkroscek atau sebagai pendukung data yang diperoleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan. Dokumen bisa berbentuk catatan harian, buku, laporan, arsip, foto dan lain-lainnya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dokumentasi yang digunakan adalah dengan mencari data yang

berkaitan dengan penelitian untuk mendukung data yang diperoleh yakni sebagai berikut :

- 1) Monografi Kalurahan Wonokerto;
- 2) Data mengenai jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat di Kalurahan Wonokerto;
- 3) Catatan harian yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan saat melakukan penelitian; dan
- 4) Foto saat melakukan kegiatan penelitian.

Pada penelitian ini, data dokumentasi yang diperoleh peneliti pada saat melakukan penelitian yaitu berupa rekap data UMKM Kalurahan Wonokerto yang berisi tentang berbagai jenis usaha dari pelaku UMKM diantaranya yaitu berupa usaha yang bergerak dibidang kuliner mulai dari olahan siap saji hingga makanan yang dapat bertahan lama, usaha budidaya unggas, ikan, anggrek dan salak pondoh, usaha yang bergerak dibidang jasa seperti salon, konveksi atau penjahit, dekorasi, laundry, bengkel dan lainnya. Selain itu, terdapat juga usaha kerajinan seperti kerajinan tali kur dan industri kerajinan kulit, bidang fashion seperti bisnis baju, dan berbagai jenis usaha lainnya. Kemudian, berdasarkan rekap data UMKM tersebut, peneliti juga dapat mengetahui bahwa terdapat sebanyak 739 UMKM yang berada di Kalurahan Wonokerto dan 9 diantaranya merupakan UMKM kelompok.

Selain itu, data lainnya yang diperoleh peneliti yaitu data monografi Kalurahan Wonokerto yang didalamnya memuat data mengenai gambaran UMKM Kalurahan Wonokerto, organisasi pemerintahan kalurahan, kondisi geografis, kondisi demografis, kondisi ekonomi, sosial dan data lainnya. Selanjutnya, selama penelitian, peneliti juga mendokumentasikan saat melakukan wawancara dengan informan serta membuat catatan yang berisi hasil wawancara yang telah dilakukan.

d. Triangulasi

Selain itu, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode triangulasi data. Tujuan dari triangulasi menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2020:316), adalah untuk lebih meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data.

Dengan demikian pada triangulasi, peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian, setelah data dikumpulkan atau

diperoleh dari beberapa sumber, maka peneliti akan melakukan pemeriksaan silang dengan membandingkan data wawancara dengan data observasi dan juga terhadap dokumen yang diperoleh peneliti.

7. Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis data ialah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan untuk menambah pemahaman sendiri mengenai bahan-bahan tersebut sehingga memungkinkan temuan tersebut dilaporkan pada pihak lain (Salim dan Syahrum, 2012:145). Dengan analisis data, maka data tersusun dengan baik dan teratur sehingga dapat diketahui makna dari temuan sesuai fokus penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas (Sugiyono, 2020:321). Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Salim dan Syahrum, 2012:147).

a. Reduksi Data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemuatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Jadi, reduksi data adalah lebih memfokuskan, menyederhanakan dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola. Tegasnya, reduksi adalah membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat bagian dan penggolongan (Salim dan Syahrum, 2012:148).

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman penyajian data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagian. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan (Salim dan Syahrum, 2012:149-150).

c. Menarik Kesimpulan

Setelah data disajikan dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan informan. Apabila

hasil diklarifikasi memperkuat simpulan atas data yang tidak valid, maka pengumpulan data siap di hentikan (Salim dan Syahrum, 2012:150).

BAB II

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kalurahan Wonokerto

Wonokerto merupakan kalurahan yang berada di lereng gunung Merapi dan terletak di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awalnya, Kalurahan Wonokerto merupakan penggabungan dari beberapa wilayah yang terdiri dari 4 (empat) kalurahan yaitu Kalurahan Tunggularum, Kalurahan Ledok Lempong, Kalurahan Tungkul, dan Kalurahan Dadapan.

Pada tahun 1947 sampai dengan tahun 1954 dipimpin oleh Bapak Niti Pawiro, pusat pemerintaan desa berada di Padukuhan Dadapan menempati Rumah Bapak Lurah Niti Pawiro. Pada masa tersebut pembangunan desa belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan terbatasnya dana dan situasi masih dalam gejolak keamanan. Selanjutnya tahun 1954 sampai dengan tahun 1961 Pada tahun tersebut Desa Wonokerto dipimpin oleh Wiro Sudarmo, Kantor pemerintahan desa berada di Padukuhan Sangurejo. Pada masa tersebut telah dirintis pembangunan jalan, jembatan saluran air dan pembuatan lapangan Punthuk.

Tahun 1962 sampai dengan tahun 1996, pada masa ini Kalurahan Wonokerto dipimpin oleh Bapak Sastro Diharjo, awal kepemimpinannya kantor kepala Desa Wonokerto masih di rumah Bapak Lurah Desa yaitu di

Nganggrung Lor Wonokerto Turi Sleman dan sedangkan mulai tahun 1968 Kantor Desa Wonokerto pindah di Dusun Imorejo, Wonokerto, Turi. Adapun, hasil-hasil pembangunan antara lain pembangunan saluan air Bedhog Krasak, Sempu Baru, Sempu I dan Pandan Arum, pembangunan jalan tembus Imorejo Kiringan, pembangunan jalan Sempu-Kaliurang, pembangunan jalan Nganggrung-Garongan, pembangunan SD Banyuurip I dan II, SD Ngangrung I dan II, SD Muh Balerante, pembangunan gedung kantor desa dan barak pengungsian, serta pembangunan puskesmas pembantu.

Tahun 1996 sampai dengan tahun 2004, kepala desa dijabat oleh Bapak Suhartono. Hasil-hasil pembangunannya antara lain rehab pasar desa, pembangunan kios desa, dan juga pembangunan pasar ikan.

Tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, pada periode ini Kalurahan Wonokerto dipimpin oleh Bapak Kasidi. Adapun, hasil-hasil pembangunan yaitu berupa pembangunan gedung kantor desa dan pembuatan pendopo kantor desa Wonokerto.

Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, pada periode ini kepala desa Wonokerto dipimpin oleh Bapak Tomon Haryo Wirosobo. Hasil pembangunan diantaranya yaitu pemberdayaan masyarakat desa wisata, pendirian relawan bencana, dan juga pembangunan gapura.

B. Kondisi Geografis

Kondisi geografis merupakan kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari aspek keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Adapun, aspek-aspek tersebut antara lain letak, luas wilayah, iklim, jenis tanah, flora, fauna, serta sumber daya. Pada bagian ini yang akan dibahas adalah kondisi atau keadaan geografis di wilayah Kalurahan Wonokerto.

1. Letak dan Batas Wilayah

Gambar II.1

Peta Wilayah Kalurahan Wonokerto



Sumber Data : Monografi Kalurahan Wonokerto Tahun 2020

Kalurahan Wonokerto berada di kaki atau lereng Gunung Merapi yang terletak di Kapanewon Turi Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Kalurahan Wonokerto terletak pada ketinggian 400 s/d 900m dari permukaan air laut. Dengan ketinggian tersebut, sebagian besar wilayahnya adalah pertanian. Secara administratif, Kalurahan Wonokerto merupakan salah satu kalurahan yang berada di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Wonokerto terdapat sebanyak 13 padukuhan dan terdiri dari 63 RT serta 29 RW. Kalurahan Wonokerto memiliki batas-batas dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Girikerto.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Girikerto.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Donokerto.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

2. Luas Wilayah

Kalurahan Wonokerto memiliki luas wilayah 1.002,9 Ha, yang terdiri dari wilayah untuk sawah/pertanian, ladang/tegalan, perkebunan, permukiman, industri, perdagangan dan jasa, hutan serta lain- lainnya. Adapun, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.1**Luas Wilayah Kalurahan Wonokerto**

No	Lahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Sawah/Pertanian	236,4	23,57
2	Ladang/Tegalan	187,1	18,66
3	Insdustri	1,2	0,12
4	Perkebunan	314,3	31,34
5	Pemukiman	238	23,73
6	Perdagangan/Jasa	3,9	0,39
7	Hutan	17	1,70
8	Lain-lain	5	0,50
Total		1002,9 Ha	100%

Sumber Data : Profil Potensi Desa Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa luas wilayah Kalurahan Wonokerto secara keseluruhan adalah 1002,9 Ha. Luas tersebut terbagi ke dalam beberapa karakteristik sesuai dengan peruntukan lahan sehingga hal ini membawa pengaruh terhadap mata pencaharian penduduk Kalurahan Wonokerto. Pada umumnya, lahan di wilayah Kalurahan Wonokerto digunakan untuk lahan pertanian, namun sebagian dari wilayahnya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk lahan pertanian. Hal ini disebabkan saluran irigasi yang rusak akibat dampak sekunder bencana erupsi gunung merapi dan pertumbuhan tanaman menjadi tidak maksimal. Namun demikian,

tanaman padi, jagung, kacang tanah, dan cabai masih menjadi tanaman pertanian di Kalurahan Wonokerto, terutama tanaman cabai yang hasilnya cukup menjanjikan disaat harganya mahal.

Selanjutnya, sektor perkebunan juga menjadi salah satu andalan dan merupakan pendapatan utama masyarakat di Kalurahan Wonokerto. Disektor perkebunan, hampir semua wilayah Kalurahan Wonokerto terdapat tanaman salak pondoh. Namun, dalam kondisi saat ini, masyarakat petani salak mengalami kendala dalam pemulihian kembali perkebunan salak pondoh pasca erupsi gunung merapi yang diakibatkan karena pohon salak tertutup abu vulkanik dan rusaknya saluran irigasi. Tanaman salak pondoh merupakan potensi yang terdapat di Kalurahan Wonokerto. Tanaman salak sendiri sudah mulai banyak dikembangkan oleh masyarakat sekitar terutama pelaku UMKM, yang diolah menjadi berbagai olahan seperti manisan salak, dodol salak, keripik, wajik dan berbagai produk lainnya. Sementara itu, penggunaan lahan untuk pemukiman juga tergolong cukup besar yang mana kawasan untuk pemukiman ini tentunya akan terus berkembang dan semakin bertambah seiring berjalannya waktu dan tersebar diseluruh wilayah Kalurahan Wonokerto, hal ini dapat disebabnya karena bertambahnya jumlah penduduk di Wonokerto. Selain itu, penggunaan lahan untuk industri, perdagangan dan jasa tidak begitu luas. Hal ini dikarena, banyak masyarakat sekitar seperti pelaku UMKM yang memanfaatkan rumahnya untuk dijadikan tempat usaha atau kegiatan produksi.

Namun, disisi lain memang terdapat pula tempat yang dikhususkan dan terpisah dari rumah pelaku usaha untuk dijadikan tempat membuka usaha seperti pasar atau kios milik kalurahan. Fasilitas ekonomi, seperti pasar yang ada di Kalurahan Wonokerto tidak hanya melayani wilayah Kalurahan Wonokerto saja, akan tetapi juga melayani Kalurahan di sekitarnya. Sehingga, hal inilah yang mempengaruhi penggunaan lahan untuk industri, perdagangan dan jasa tidak begitu luas.

3. Iklim Wilayah

Kalurahan Wonokerto adalah daerah pertanian dengan sumber 26 mata air yang mengalir ke beberapa sungai krasak, sungai bedog dan sungai sempor, yang mencukupi kebutuhan irigasi pertanian. Curah hujan rata-rata 3,908 mm pertahun dengan suhu udara 24°C s/d 28°C. Sumber air tanah yang mengalir di bawah permukaan berada di jalur mata air Turi Sleman yang pemanfaatannya digunakan untuk sumber air bersih dan irigasi. Namun pada musim kemarau sebagian wilayah kekurangan air untuk pertanian, sedangkan untuk kebutuhan air minum sumber air tanah atau sumur di Kalurahan Wonokerto masih tercukupi.

C. Kondisi Demografi

Data demografi merupakan data yang berkaitan dengan kependudukan disuatu wilayah. Data demografi sangat penting untuk pemerintah kalurahan agar dapat memantau terkait dengan keadaan masyarakatnya melalui data yang tersedia. Adapun, ruang lingkup demografi meliputi ukuran, struktur,

dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Total jumlah penduduk Kalurahan Wonokerto adalah 10.006 jiwa yang tersebar di 13 padukuhan. Adapun, tabel yang menyajikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kalurahan Wonokerto adalah sebagai berikut :

Tabel II.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	4.981	49,78
2	Perempuan	5.024	50,22
	Total	10.006	100%

Sumber Data : Monografi Kalurahan Wonokerto Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kalurahan Wonokerto yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak atau dominan dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Lajunya pertumbuhan penduduk yang berjenis kelamin perempuan ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelahiran ataupun perpindahan penduduk dari luar ke dalam wilayah Kalurahan Wonokerto. Pada sektor industri rumah tangga atau UMKM, peran perempuan dalam mengelola sektor tersebut sangat diperlukan. Selain, dapat memperluas lapangan pekerjaan,

melalui UMKM masyarakat khususnya penduduk yang berjenis kelamin perempuan juga dapat memperoleh pemasukan melalui usaha atau bisnis yang dikembangkan. Sehingga hal ini dapat memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kalurahan Wonokerto.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Pada tabel di bawah ini akan menampilkan jumlah penduduk Kalurahan Wonokerto yang diklasifikasikan berdasarkan tingkatan usia.

Tabel II.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	Bayi (<1 tahun)	198	1.98
2	Balita (2-4 tahun)	448	4.48
3	Anak-anak (5-9 tahun)	576	5.76
4	Anak-anak (10-14 tahun)	396	3.96
5	Remaja (15-19 tahun)	678	6.78
6	Remaja (20-24 tahun)	825	8.25
7	Dewasa (25-29 tahun)	753	7.53
8	Dewasa (30-34 tahun)	718	7.18
9	Dewasa (35-39 tahun)	870	8.69
10	Dewasa (40-44 tahun)	840	8.39
11	Tua (45-49 tahun)	885	8.84
12	Tua (50-54 tahun)	818	8.18
13	Tua (55-59 tahun)	610	6.10
14	Tua (60-64 tahun)	420	4.20
15	Tua (65-69 tahun)	323	3.23
16	Tua (70-74 tahun)	227	2.27

17	Lansia (>75 tahun)	421	4.21
	Total	10.006	100%

Sumber Data : Monografi Kalurahan Wonokerto Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kalurahan Wonokerto adalah tergolong berusia produktif. Dengan demikian, tinggi jumlah penduduk yang berusia produktif ini berarti bahwa sumber daya manusia yang membutuhkan lapangan pekerjaan menjadi sangat banyak. Untuk itu, pemerintah kalurahan harus memperhatikan hal tersebut agar limpahan sumber daya manusia ini tidak disia-siakan atau malah menambah tingkat angka pengangguran di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah kalurahan dapat menyediakan atau membuka lapangan pekerjaan bagi warga yang membutuhkan seperti untuk mengelola potensi-potensi yang berada di Kalurahan Wonokerto terutama di kawasan wisata. Sebab, sumber daya manusia merupakan sebagai modal penggerak dalam proses pembangunan yang ada di Kalurahan Wonokerto. Partisipatif dari masyarakat merupakan sesuatu yang mutlak harus ada. Kebersamaan yang telah hidup dan berkembang di Kalurahan Wonokerto akan melahirkan kekuatan yang besar dalam proses pembangunan. Oleh karena itu partisipatif merupakan bagian yang amat penting dalam proses pembangunan. Dengan adanya partisipasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, maka hal ini akan mendorong masyarakat untuk menjadi lebih memahami segala sesuatu yang terkait dengan kalurahan. Kemudian, tingginya jumlah penduduk yang berusia

produktif ini dapat memperkuat peran UMKM dalam memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan atau yang ingin merintis sebuah usaha. Di Kalurahan Wonokerto keberadaan UMKM terus bertambah karena UMKM mampu memberikan peluang usaha bagi kalangan industri skala rumah tangga, sehingga hal ini membuktikan bahwa UMKM menjadi salah satu solusi bagi pertumbuhan angkatan kerja.

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah aspek yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas maka proses pembangunan maupun pemberdayaan yang ada di suatu wilayah akan berjalan dengan baik. Berikut merupakan tabel yang berisi data jumlah penduduk Kaluraha Wonokerto berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel II.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Peduduk	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	672	6.94
2	Paud	314	3.24
3	TK	718	7.42
4	SD	2.569	26.53
5	SMP	1.880	19.42
6	SMU	2.231	23.04
7	Akademi/ PT	363	3.75
8	Tidak Sekolah	935	9.66

Total	9.682	100%
-------	-------	------

Sumber Data : Monografi Kalurahan Wonokerto Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan SD (Sekolah Dasar) menduduki peringkat pertama terbanyak di Kalurahan Wonokerto. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masyarakat yang kurang memperhatikan betapa pentingnya pendidikan. Tingginya jumlah penduduk pada tingkat pendidikan sekolah dasar ini, seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kalurahan untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat Wonokerto untuk dapat melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya. Apalagi, pada saat sekarang ini mencari pekerjaan dengan bermodalkan ijazah SD cukuplah sulit. Disamping itu, sekarang telah banyak program beasiswa yang telah disediakan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, terbukanya peluang dan kesempatan ini harusnya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin bagi pemerintah kalurahan untuk memberikan dorongan dan memotivasi warga untuk dapat mengenyam pendidikan. Selain itu, dalam mendukung pengembangan UMKM yang berada di Kalurahan Wonokerto, tingkat pendidikan menjadi salah satu modal yang sangat penting. Sebab, lemahnya UMKM dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, melalui pendidikan sumber daya manusia dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Dengan adanya keterampilan yang dimiliki maka akan dapat

memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, memperluas pangsa pasar, dan bahkan dapat menembus pasar baru.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan suatu kegiatan pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh penduduk dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berikut merupakan data jumlah penduduk Kalurahan Wonokerto berdasarkan mata pencaharian.

Tabel II.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	3.141	32.44
2	Buruh	605	6.25
3	Pedagang	504	5.21
4	Pegawai Swasta	444	4.59
5	PNS	279	2.88
6	Perkebunan	120	1.24
7	Industri Rumah Tangga	94	0.97
8	Lain-lain	4.495	46.43
Total		9.682	100%

Sumber Data : Monografi Kalurahan Wonokerto Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kalurahan Wonokerto untuk mata pencaharian yang cukup banyak adalah petani. Untuk sektor pertanian didominasi oleh pertanian atau perkebunan salak pondoh yang merupakan pendapatan utama dari para petani dan

sekaligus merupakan sektor yang telah mengangkat perekonomian masyarakat Kalurahan Wonokerto. Hampir semua masyarakat Kalurahan Wonokerto menanam dan berusaha yang berhubungan dengan salak pondoh, baik itu pengepul atau pedagang, penyedia angkutan ataupun jasa lainnya seperti membersihkan lahan salak pondoh. Sedangkan, untuk mata pencaharian disektor industri rumah tangga tergolong sedikit berdasarkan data tahun 2020 tersebut. Namun, untuk saat ini, jumlah tersebut sudah semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Hal ini didukung dari data yang diperoleh oleh peneliti yang berisi rekapan data UMKM di Kalurahan Wonokerto, yang mana pada data tersebut tercatat jumlah UMKM kian berkembang dan terus bertumbuh hingga kini jumlahnya mencapai 739 pelaku UMKM baik yang perorangan maupun kelompok. Meskipun, jumlahnya semakin bertambah bukan berarti UMKM di Kalurahan Wonokerto tidak luput dari permasalahan atau kendala saat menjalankan usaha. Pelaku UMKM juga kerap mendapati kendala baik itu terbatasnya modal, lemahnya pemasaran, kurangnya alat yang memadai untuk membantu proses produksi, hingga pelatihan yang kurang variatif karena tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

D. Kondisi Sosial

Kehidupan masyarakat di Kalurahan Wonokerto dipenuhi dengan semangat kekeluargaan, kebersamaan, dan juga gotong royong. Sehingga, jika terdapat permasalahan ataupun persoalan maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan melalui mekanisme mufakat dan musyawarah. Disamping itu, dalam kehidupan masyarakat juga masih terdapat banyak yang memiliki hubungan kekerabatan, sehingga hal ini membuat mereka terbiasa untuk saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Seperti, ketika terdapat acara hajatan yakni kenduri atau kondangan yang sering dilakukan untuk memperingati hari-hari besar Islam maupun peringatan-peringatan lainnya maka mereka akan saling tolong-menolong untuk membantu melaksanakan acara tersebut. Selain itu, juga terdapat beragam kegiatan kemasyarakatan yang sengaja diadakan untuk mempererat hubungan kekeluargaan antar warga, diantaranya yaitu seperti arisan, PKK, posyandu, siskamling, karang taurna, dan lainnya. Semua kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mempererat hubungan persaudaraan antara warga. Bahkan, banyak sekali terdapat organisasi kemasyarakatan yang berkembang dan masih aktif di Kalurahan Wonokerto.

E. Kondisi Budaya

Budaya yang berkembang di Kalurahan Wonokerto adalah budaya masyarakat agraris, salah satunya adalah sifat gotong royong dan kekeluargaan masyarakatnya masih tinggi. Keberadaan kesenian di

Kalurahan Wonokerto sangat beragam yang bernuansa adat Jawa seperti kesenian jathilan, kubro siswo, dayakan, dadwi, wayang orang sampai yang bernuansa Islami seperti hadroh. Semua berkembang dengan baik dan selaras dikarenakan masyarakat Kalurahan Wonokerto selain agamis juga mempunyai budaya kearifan lokal yang tinggi terhadap anggota masyarakat sekitar. Warga Kalurahan Wonokerto juga masih menjunjung tinggi adat istiadat mereka sebagai orang Jawa seperti masih menjalankan atau melaksanakan berbagai upacara-upacara tradisi yang berkaitan dengan daur hidup atau *life circle*, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Upacara mitoni yaitu selamatan pada saat usia kehamilan mencapai genap 7 bulan.
2. Upacara puputan yaitu upacara selamatan pada saat tali pusar bayi sudah lepas atau mengering.
3. Jagongan yaitu acara wungon (tidak tidur semalam suntuk) atau bertandang di rumah keluarga yang baru melahirkan bayi pada malam hari selama kurang lebih 7 malam (satu minggu).
4. Selapanan yaitu acara kenduri atau selamatan bertepatan dengan usia bayi 35 hari sebagai ucapan rasa syukur.
5. Upacara kematian, dari surtanah, upacara kenduri tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, setahun, dua tahun sampai 1000 hari.
6. Upacara khitanan yaitu tanda bahwa anak laki-laki sudah mulai memasuki aqil balig menjadi laki-laki dewasa.

7. Upacara pernikahan dengan berbagai urutan pernak pernik tradisi jawa seperti siraman, midodareni, ijab, panggih dan resepsi.
8. Upacara Adat Merti Bumi sebagai icon Kalurahan Wonokerto yang diwujudkan atas rasa syukur kepada Tuhan.
9. Upacara adat pager bumi yang secara garis besar hampir sama dengan upacara adat merti bumi Kelompok RT (Rukun Tetangga) kegiatannya cukup menonjol dan fanatik akan pembangunan baik dari penggerjaan dan segi pembiayaan meski demikian kesatuan warga dusun masih tetap terpelihara.

Even-even penting seperti peringatan hari besar nasional hari besar keagamaan dan kegiatan adat dilaksanakan rutin setiap tahunnya sehingga dalam kegiatan tersebut sebagai pembelajaran generasi penerusnya serta memberikan kesempatan kepada grup-grup seni budaya yang ada di dalamnya untuk mengekspresikan kemampuannya. Semua kegiatan ini adalah sebuah bentuk realisasi masyarakat Kalurahan Wonokerto yang masih mengusung budaya kekeluargaan.

F. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian Kalurahan Wonokerto terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor utama adalah pertanian termasuk di dalamnya perkebunan salak, perikanan dan peternakan. Hal ini bisa dilihat dari mata pencaharian penduduk, yang rata-rata adalah petani. Untuk sektor pertanian didominasi oleh pertanian atau perkebunan salak pondoh yang merupakan pendapatan

utama para petani dan merupakan sektor yang telah mengangkat perekonomian masyarakat Kalurahan Wonokerto. Akan tetapi, sekarang kondisi pertanian belum tergarap secara optimal. Kondisi ini dipicu karena rusaknya sistem irigasi yang ada hampir diseluruh wilayah Wonokerto akibat dampak sekunder erupsi gunung merapi tahun 2010. Efek yang ditimbulkan dari rusaknya sistem irigasi adalah masyarakat hanya dapat panen 2 kali dalam setahun sehingga panen salak pondoh menurun karena pertumbuhannya tidak maksimal.

Hampir semua masyarakat Kalurahan Wonokerto menanam dan berusaha yang berhubungan dengan salak pondoh, baik itu pengepul atau pedagang, penyedia angkutan ataupun jasa lainnya seperti membersihkan lahan salak pondoh. Namun demikian sektor yang lain seperti industri rumah tangga atau UMKM, perdagangan dan jasa juga banyak digeluti oleh masyarakat Kalurahan Wonokerto. Di sektor domestik, termasuk di dalamnya yaitu UMKM menjadi salah satu potensi ekonomi yang berada di Kalurahan Wonokerto. Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang disingkat dengan UMKM menjadi wadah terciptanya lapangan pekerjaan untuk warga sekitar, sehingga dengan adanya penyerapan tenaga kerja ini dapat membantu masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang nantinya akan berdampak pada kesejahteraan warga Kalurahan Wonokerto yang semakin meningkat. Melalui UMKM, warga dapat mengembangkan kegiatan ekonomi lokal dalam rangka untuk mengangkat produk-produk lokal ke masyarakat luas. Pada sektor ini, peran kaum perempuan dalam

mengelola UMKM atau industri rumah tangga, seperti makanan dan minuman, kerajinan, dan potensi yang lain belum tergarap secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan terkendala masalah modal, pemasaran hasil produksi maupun kurangnya skill atau keahlian dari warga masyarakat yang potensial. Selain itu, potensi perikanan atau kolam ikan juga banyak dibudidayakan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Wonokerto juga memiliki obyek wisata baik yang dikelola oleh Kalurahan maupun oleh masyarakat yaitu wisata bumi perkemahan di Padukuhan Pojok, wisata alam di Padukuhan Tunggularum. Sedangkan peternakan yang dikembangkan di Kalurahan Wonokerto adalah ternak sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, bebek atau itik, burung puyuh dan ayam. Harapan dikembangkannya potensi atau usaha peternakan tersebut oleh masyarakat tidak lain juga adalah untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

G. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang untuk memudahkan berbagai aktivitas manusia. Berikut data sarana dan prasarana yang terdapat di Kalurahan Wonokerto.

1. Sarana dan Prasana Pendidikan

Untuk mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas maka perlu adanya kemudahan dalam mendapatkan akses

pendidikan, terutama yaitu berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Berikut adalah data mengenai jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang berada di Kalurahan Wonokerto.

Tabel II.6

Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	Gedung Sekolah PAUD	7	30.4
2	Gedung Sekolah TK	7	30.4
3	Gedung Sekolah SD	7	30.4
4	Gedung Sekolah SMP	1	4.3
5	Gedung Sekolah SMA	1	4.3
Total		23	100%

Sumber Data : Monografi Kalurahan Wonokerto Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kalurahan Wonokerto memiliki fasilitas pendidikan yang cukup memadai untuk penduduk, mulai dari gedung sekolah untuk PAUD, Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta gedung Sekolah Menengah Atas (SMA). Dengan tersedianya sarana pendidikan yang cukup memadai di Kalurahan Wonokerto, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi penduduk yang ingin mengenyam pendidikan dan juga sebagai dukungan dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, melalui ketersediaan sarana berupa gedung sekolah ini semoga dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya untuk menempuh pendidikan

sehingga hal ini dapat menekan atau memperkecil angka penduduk yang hanya tamatan sekolah dasar ataupun yang tidak bersekolah.

H. Pemerintah Kalurahan Wonokerto

1. Visi dan Misi Pemerintah Kalurahan Wonokerto

a. Visi

Dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi wilayah, maka untuk pembangunan Kalurahan Wonokerto ke depan dirumuskan visi sebagai berikut “Wonokerto sebagai kalurahan siaga bencana yang aman, nyaman, adil, makmur, sejahtera berbudaya dan relegius”.

b. Misi

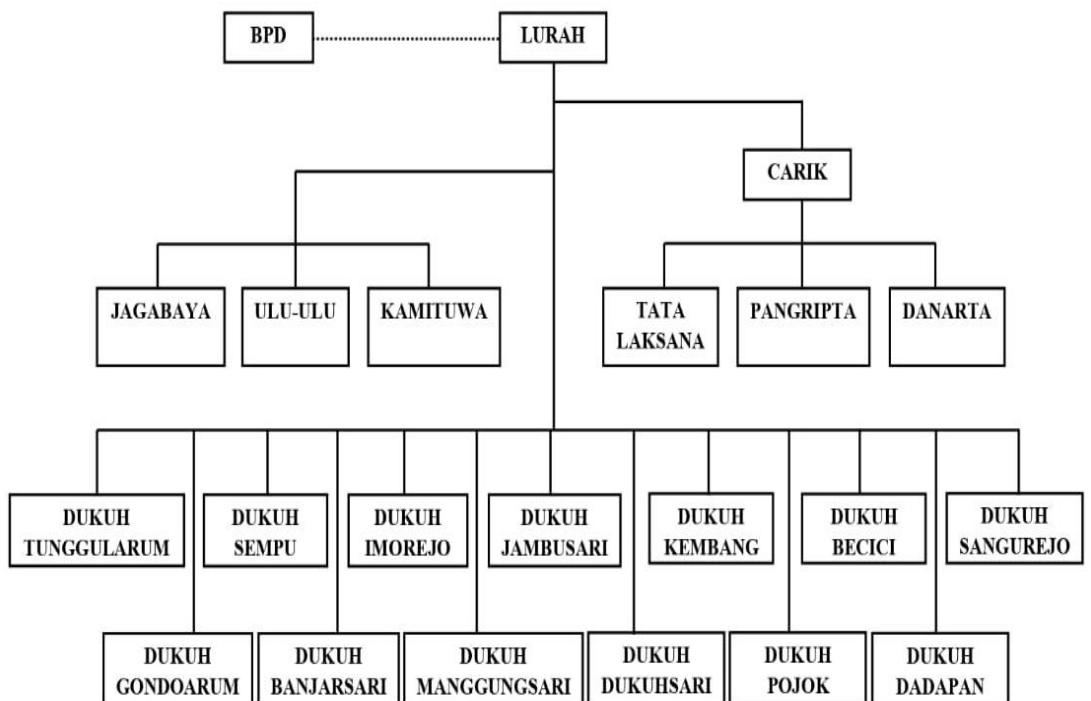
- 1) Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana mengingat wilayah Kalurahan Wonokerto merupakan Kawasan Rawan Bencana (KRB) I, II dan III khususnya bencana akibat erupsi gunung merapi.
- 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana.
- 3) Mewujudkan pemerintahan kalurahan yang akuntabel, transparan, berintegritas, berdedikasi, bermartabat dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan sendiri/golongan.

- 4) Menjadikan Kalurahan Wonokerto sebagai kalurahan wisata yang didukung oleh sumber daya alam, seni dan budaya, industri kreatif dan industri kuliner.
- 5) Meningkatkan kualitas pendidikan: budi pekerti, keagamaan, informal dan nonformal untuk menciptakan sumber daya manusia yang trampil, cerdas, berbudi pekerti luhur dan berdaya saing
- 6) Menjadikan Kalurahan Wonokerto sebagai kalurahan yang sejahtera, adil dan makmur bertumpu pada tiga pilar yaitu agroindustri, agrobisnis dan agrowisata.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto terdiri atas lurah dan perangkat desa, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar II.2
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan
Wonokerto



Sumber Data : Monografi Kalurahan Wonokerto 2020

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa Kalurahan Wonokerto dipimpin oleh seorang kepala desa atau lurah, serta dibantu oleh perangkat-perangkat di bawahnya yang menjadi instrumen dalam keberlangsungan terhadap pelayanan dan program kerja Pemerintah Kalurahan Wonokerto. Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan dari tugas dan tanggungjawabnya, pemerintah Kalurahan Wonokerto akan diawasi oleh lembaga BPKal. Keberadaan BPKal ini harus dimaknai sebagai mitra pemerintah kalurahan dan kedudukannya adalah sejajar, bukan berada di atas ataupun di bawah pemerintah kalurahan.

Keberadaan BPKal ini adalah sebagai bentuk check and balances terhadap penyelenggaran pemerintahan kalurahan agar lebih terarah dan terkontrol. Pengawasan ini juga dilakukan sebagai bentuk untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah kalurahan.

BAB IV

PENUTUP

Setelah melakukan analisis data terhadap data yang diperoleh baik itu melalui wawancara terhadap informan, observasi maupun dokumentasi, maka selanjutnya pada bab penutup ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dan saran. Untuk itu, berdasarkan hasil penelitian pada uraian bab sebelumnya maka dapat digambarkan bahwa Governabilitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa governabilitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM setelah menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kapasitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM melalui penyediaan pelatihan dan menjalin kerjasama dengan pihak luar, bahwasannya pemerintah kalurahan telah mengupayakan berbagai langkah untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing UMKM dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti dinas-dinas terkait dalam pemberian pelatihan sebagai bentuk untuk melatih

kemampuan, keterampilan dan juga meningkatkan wawasan pelaku UMKM. Namun, pelatihan yang disediakan oleh pemerintah kalurahan kurang variatif sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan pemerintah kalurahan belum mampu sepenuhnya menggali kebutuhan pelaku UMKM dengan baik, sehingga pelatihan yang diberikan tidak dapat sepenuhnya menyentuh ke berbagai bidang usaha lainnya.

2. Kapasitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM melalui fasilitasi kegiatan pemasaran dan bantuan alat produksi bagi pelaku UMKM bahwasannya pemerintah kalurahan telah menyediakan bantuan berupa alat bagi UMKM, serta memfasilitasi kegiatan pemasaran UMKM dengan membangun stand-stand untuk pelaku UMKM diberbagai tempat destinasi wisata yang berada di Kalurahan Wonokerto. Namun, pemberian bantuan alat untuk menunjang proses produksi belum dapat diberikan secara merata karena pemerintah kalurahan hanya menyediakan bantuan alat bagi pelaku UMKM kelompok. Sementara itu, kendala atau hambatan pemerintah kalurahan dalam mendorong pengembangan UMKM yaitu dikarenakan lemahnya pemasaran, banyaknya produk yang dihasilkan tidak diimbangi dengan kemampuan dalam memperluas akses pasar, sehingga lemahnya akses pasar ini berdampak pada sempitnya peluang pasar bagi UMKM.
3. Pelaku UMKM juga kurang mengembangkan potensi dirinya dengan semaksimal mungkin sehingga sering kali menjadi penyebab hilangnya

kesempatan ataupun peluang yang ada. Oleh karena itu, dalam pengembangan UMKM program yang telah disediakan tidak semata-mata hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kalurahan saja, tetapi pelaku UMKM sendiri sebagai pihak internal yang dikembangkan dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah kalurahan agar program pengembangan UMKM dapat benar-benar berdampak untuk perkembangan UMKM ke arah yang semakin baik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang governabilitas pemerintah kalurahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Wonokerto, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Instansi Pemerintah Kalurahan Wonokerto

Untuk membentuk UMKM yang unggul dan mandiri, pemerintah kalurahan dalam kaitannya melakukan pengembangan harus dilakukan secara berkesinambungan. Dengan demikian, melalui program yang berkelanjutan diharapkan permasalahan UMKM dapat digarap secara tuntas. Selain itu, pemerintah kalurahan juga harus memperhatikan secara merata berbagai usaha yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, dalam artian bahwa pemerintah kalurahan tidak hanya berfokus pada UMKM kelompok ataupun bidang usaha tertentu saja tetapi juga harus memperhatikan secara menyeluruh agar pelaku UMKM lainnya dapat merasakan hal sama. Seperti halnya dalam

pemberian pelatihan pemerintah kalurahan sebaiknya harus lebih mengetahui dan menggali lebih dalam apa saja kebutuhan UMKM. Dengan mengetahui kebutuhan UMKM, maka hal ini dapat mudahkan pemerintah kalurahan dalam memberikan pelatihan sesuai dengan klasifikasi jenis usaha UMKM. Selain itu, terkait dengan bantuan alat kepada pelaku UMKM, seharusnya pemerintah kalurahan juga memperhatikan pelaku UMKM lainnya yang bukan kelompok, karena masih terdapat banyak UMKM perseorangan yang belum mampu untuk membeli alat produksi.

2. Bagi Masyarakat Pelaku UMKM

Bagi masyarakat pelaku UMKM agar lebih meningkatkan kreatifitas dan mengasah potensi yang dimiliki dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti pelatihan yang telah difasilitasi oleh pemerintah kalurahan maupun program-program lainnya yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan UMKM. Hal ini dilakukan agar dapat menambah wawasan dan pengalaman yang dimiliki oleh pelaku UMKM yang kemudian akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia UMKM menjadi semakin baik. Selain itu, pelaku UMKM juga harus terus berinovasi dan mengembangkan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai program untuk dapat mengikuti arus perkembangan zaman terutama digitalisasi. Dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi maka akan memberikan pengaruh perkembangan usaha yang semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, Fitri Meri. (2021). *Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan UMKM Produk Olahan Salak di Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. STPMD “APMD”, Yogyakarta.
- Anggraeni, Feni Dwi, dkk. (2013). *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Eksternal dan Potensi Internal*. Jurnal Administrasi Publik. Vol.1. No.6. Hal. 1286-1295.
- Anoraga, Pandji. (2011). *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beku, Maria Vinsensia. (2021). *Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Skripsi. STPMD “APMD”, Yogyakarta.
- Budiarto, Rachmawan, dkk. (2019). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fairus, Adira. (2020). *Mengenal Desa Dan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pixelindo.
- Glory, Brygitta. *Tujuan Penelitian: Eksploratif, Deskripstif, Eksplanatif, dan Evaluatif*. ir.binus.ac.id. Diakses pada 28 Maret 2022 dari <https://ir.binus.ac.id/2020/05/04/youtube-tujuan-penelitian-eksploratif-deskriptif-eksplanatif-dan-evaluatif/>
- Kooiman, Jan, dkk. (2008). *Interactive Governance and Governability: An Introduction*. Journal of Transdisciplinary Environmental Studies. Vol.1. No.1. Hal. 2-11.
- Kurniawan, Ferry Duwi & Luluk Fauziah. (2014). *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik. Vol. 2. No.2. Hal. 165-175. DOI: <https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i2.436>.
- Mustakim, Mochammad Zaini. (2015). *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Nugroho, Hanantyo Sri. (2018). *Democratic Governance (Studi Mengenai Governability Dalam Pengembangan UMKM berbasis e-commerce di Kota Yogyakarta)*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol.6. No.1. Hal. 30-46. DOI: <https://doi.org/10.31289/publika.v6i1.1467>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Rosana, Ellya. (2012). *Partai Politik dan Pembangunan Politik*. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam. Vol.8. No.1. Hal. 135-150. DOI: <https://doi.org/10.24042/tps.v8i1.1548>.

Salim dan Syahrum. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

Sanyoto, Yahnu Wiguno. (2020). *Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Sonjaya, Dindin Abdurohim Brata. (2021). *Pengembangan UMKM (Kebijakan, Strategi, Digital Marketing dan Model Bisnis UMKM)*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sugiman. (2018). *Pemerintah Desa*. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Vol.7. No. 1. Hal. 82-95.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tryatmoko, Mardyanto Wahyu. (2010). *Pemekaran Daerah Dan Persoalan Governability Lokal di Indonesia*. Jurnal Penelitian Politik. Vol.7. No.1. Hal. 37-49. DOI: <https://doi.org/10.14203/jpp.v7i1.510>.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.